

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI ANTAR WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Gracetyani Ovicha Naibaho
Juliana Ruth Mandei
Lyndon Reinhard Jacob Pangemanan

Naskah diterima melalui Email agrisocioekonomi@unsrat.ac.id
Disetujui diterbitkan

: Rabu, 23 September 2020
: Jumat, 23 Oktober 2020

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of development inequality and economic growth between districts / cities in North Sulawesi Province in 2014-2018. This research was conducted from November 2019 to March 2020. The data used in this study are secondary data. The data were obtained from the North Sulawesi Central Statistics Agency (BPS Sulut) and other literatures according to this study. The results showed that the higher income between regions would affect economic growth and inequality that occurred in North Sulawesi Province. Based on the results of the development inequality analysis, it shows low inequality with an average Williamson Index number of 0.49 (<0.5). Classification of districts / cities in North Sulawesi Province using a regional approach. Typology Klassen is divided into four classifications. Regions are developed and growing fast, regions are developed but are depressed, regions are developing fast but are not developed, and regions are relatively underdeveloped. Based on these results, this study concludes that along with the occurrence of economic growth there will also be population growth. Thus, the rate of economic growth must exceed the rate of population growth. If in the long run the economic growth equals population growth, the regional economy will not experience development and the population's level of prosperity will not progress.

Keywords: Inequality, Williamson Index, Klassen Typology

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berapa besar tingkat ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2014-2018. Penelitian ini dilakukan selama bulan November 2019 sampai bulan Maret 2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara (BPS Sulut) maupun literature-literatur lainnya sesuai penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan antar daerah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan hasil analisis ketimpangan pembangunannya menunjukkan ketidakmerataan rendah dengan rata-rata angka Indeks Williamson 0,49 (< 0,5). Pengklasifikasian kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara dengan pendekatan daerah Tipologi Klassen terbagi menjadi empat klasifikasi. Daerah maju dan tumbuh cepat, daerah maju tapi tertekan, daerah berkembang cepat tapi tidak maju, dan daerah relatif tertinggal. Berdasarkan perolehan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa bersamaan dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi akan berlaku pula pertumbuhan penduduk. Sehingga, tingkat pertumbuhan ekonomi harus melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Apabila dalam jangka panjang pertumbuhannya sama dengan pertumbuhan penduduk, maka perekonomian daerah tersebut tidak mengalami perkembangan dan tingkat kemakmuran penduduknya tidak mengalami kemajuan.

Kata kunci: Ketimpangan, Indeks Williamson, Tipologi Klassen

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan dalam lingkup Negara secara spasial tidak selalu merata. Beberapa daerah dapat mencapai pertumbuhan yang signifikan, sementara beberapa daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah yang tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan karena kurangnya sumber-sumber yang dimiliki, adanya kecenderungan pemilik modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi dan tenaga kerja yang terampil, serta ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari Pemerintah Pusat kepada daerah (Kuncoro, 2004) dalam Banendro (2016). Kemampuan tumbuh ini kemudian menyebabkan terjadinya ketimpangan baik pembangunan maupun pendapatan antar daerah. Ketimpangan pembangunan juga dapat dilihat secara vertikal yakni perbedaan pada distribusi pendapatan serta secara horizontal yakni perbedaan antara daerah maju dan terbelakang (Sjafrizal, 2008) dalam Derek, dkk (2019). Terkait dengan disparitas ekonomi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, banyak ahli yang menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk memperhatikan kondisi perbedaan pertumbuhan ekonomi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. PDRB merupakan data statistik dari perolehan nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai PDRB perkapita suatu wilayah, maka pertumbuhan ekonominya dianggap semakin tinggi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tidak serta merta diikuti oleh distribusi pendapatan yang merata kepada seluruh masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini yang selanjutnya menciptakan kesenjangan ekonomi. Dimana, kesenjangan ekonomi adalah kondisi ketidakmerataan hasil pertumbuhan ekonomi suatu wilayah kepada masyarakat wilayah tersebut.

Ketidakeragaman ini berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh yang pada gilirannya mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat sementara wilayah lainnya tumbuh lambat. Kemampuan tumbuh ini kemudian menyebabkan terjadinya ketimpangan baik pembangunan maupun pendapatan antardaerah yang terjadi di Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Utara, dilihat dalam PDRB Kabupaten/Kota berdasarkan harga konstan tahun 2014- 2018.

Ketimpangan

Dondo (2019) mengatakan bahwa dalam konteks ekonomi, ketimpangan dapat diartikan sebagai suatu cacat ekonomi yang umum terjadi dimana saja karena adanya wilayah yang maju dan wilayah yang terbelakang. Hal ini menyebabkan ketidakmerataan perekonomian suatu wilayah atau perbedaan kemajuan antar wilayah yang berarti tidak samanya kemampuan untuk bertumbuh yang analog dengan kesenjangan dan menimbulkan ketidakmerataan berupa pendapat dan studi-studi empiris yang menempatkan pemerataan dan pertumbuhan pada posisi yang dikotomis dalam hal ini.

Pembangunan Ekonomi

Menurut Meier (1995) dalam Kuncoro (2006), pembangunan ekonomi merupakan suatu proses dimana pendapatan perkapita suatu Negara meningkat selama kurun waktu yang panjang dengan jumlah penduduk yang hidup dibawah “garis kemiskinan absolute” tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang. Karena merupakan suatu proses, pembangunan ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan perubahan (growth plus change) dalam perubahan struktur ekonomi dan perubahan kelembagaan (Banendro, 2016).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan kemampuan perekonomian suatu daerah atau wilayah dalam menghasilkan barang-barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan di dalam maupun di luar wilayah atau daerah, maupun peningkatan pendapatan perkapita suatu wilayah/daerah sehingga ketimpangan dan kesenjangan didalam masyarakat tidak terjadi dan kesejahteraan dapat tercapai. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan

bagaimana aktifitas/kegiatan ekonomi mampu memberikan tambahan perolehan pendapatan masyarakat suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi biasanya dilihat dalam skala kuantitatif dan diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu (Banendro, 2016).

Indeks Williamson

Indeks ini digunakan untuk mengukur penyebaran (*dispersi*) tingkat pendapatan per kapita daerah relatif terhadap rata-rata nasional, merupakan ukuran ketimpangan pembangunan yang pertama kali ditemukan oleh Jeffrey G. Williamson dalam studinya pada tahun 1966 (Dondo, 2019). Secara statistik dalam Sjafrizal (2008) dalam Dewi, dkk (2014), formulasinya adalah sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Dimana :

- Iw : Indeks Williamson
- Yi : PDRB per kapita di kabupaten/kota i.
- Y : rata-rata PDRB perkapita di Provinsi
- fi : Jumlah penduduk di kabupaten/kota i.
- n : Jumlah penduduk di Provinsi

Nilai angka indeks (IW) yang semakin kecil atau mendekati nol, menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil atau makin merata dan sebaliknya bila semakin besar atau jauh dari nol, menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar.

Tipologi Daerah

Klassen Typology (Tipologi Klassen) adalah alat yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing- masing daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah (Kuncoro, 2002) dalam Banendro (2016). Klasifikasi daerah menurut Tipologi Klassen adalah sebagai berikut:

1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*), adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi dibandingkan daerah di atasnya;

2. Daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), adalah daerah yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi tetapi memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan daerah di atasnya;
3. Daerah berkembang cepat (*high growth but low income*), adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, tetapi memiliki tingkat pendapatan perkapita yang lebih rendah dibandingkan daerah di atasnya;
4. Daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*), adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih rendah dibandingkan daerah di atasnya.

Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2014-2018.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi antar wilayah kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Utara pada tahun 2014-2018.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tersebut pun diharapkan bermanfaat bagi semua pihak, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. dapat memberikan bahan masukan dan informasi bagi pengambil keputusan dan kebijakan dalam memahami kondisi pembangunan daerah sehingga dapat merumuskan kebijakan yang terarah dalam menata pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik masing- masing daerah,
- b. dapat menjadi informasi dan bahan pembelajaran, menambah wawasan pengetahuan peneliti tentang pelaksanaan pembangunan mengenai ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi antar wilayah kabupaten/kota di Sulawesi Utara,
- c. serta menjadi referensi pengembangan akan ketimpangan wilayah yang ada.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Manado, Sulawesi Utara yang meliputi seluruh wilayah kabupaten/kota yang terdiri dari 15 wilayah di Sulawesi Utara. Penelitian ini juga dilakukan mulai dari persiapan pada bulan November 2019 sampai dengan penulisan laporan penelitian pada bulan Juni 2020.

Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara.

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data sekunder maupun literatur-literatur lainnya dengan metode pengumpulan data yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut.

Konsep Pengukuran Variabel

Beberapa variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data time series dengan periode waktu tahun 2014-2018 yang terdiri dari:

1. PDRB Provinsi Sulawesi Utara Atas Dasar Harga Konstan
2. PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara
3. Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Utara
4. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara

Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis ketimpangan regional (Indeks Williamson) dan analisis pendekatan daerah (Tipologi Klassen) dengan pengolahan menggunakan Microsoft Excel dan SPSS.

Analisis Indeks Williamson

Menghitung ketimpangan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2014-2018, digunakan indeks ketimpangan regional (regional in equality) yang dinamakan Indeks Williamson. Metode ini diperoleh dari perhitungan pendapatan perkapita dan jumlah penduduk disuatu wilayah. Secara sistematis, perhitungan indeks Williamson sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 f^i / n}}{Y}$$

Dimana :

- IW = Indeks Williamson
- Y_i = PDRB perkapita di kabupaten/kota i
- Y = PDRB perkapita di provinsi
- f_i = Jumlah penduduk di kab/kota i
- n = Jumlah penduduk di provinsi

Menurut Permendagri No 54 Tahun 2010 dalam Budiarto (2014), kriteria IW adalah :

1. Indeks Williamson (IW) = disparitas rendah
IW < 0,5
2. Indeks Williamson (IW) = disparitas tinggi
IW ≥ 0,5

Analisis Tipologi Klassen

Menurut Tipologi Klassen, perkembangan pembangunan antar daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara dapat dikelompokkan menjadi empat kategori. Dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pengelompokan Pembangunan Wilayah Berdasarkan Tipologi Klassen

Laju Pertumbuhan (r)	PDRB Per kapita (y)	
	y _{di} > y _{ni} (+)	y _{di} < y _{ni} (-)
r _{di} > r _{ni} (+)	(Kuadran III) Daerah berkembang cepat tapi tidak maju	(Kuadran I) Daerah maju dan tumbuh cepat
r _{di} < r _{ni} (-)	(Kuadran IV) Daerah relatif tertinggal	(Kuadran II) Daerah maju tapi tertekan

Sumber : (Sjafrizal, 1997) dalam Raswita dan Utama (2013).

Keterangan :

- rdi : laju pertumbuhan kabupaten i
- rni : laju pertumbuhan total PDRB Provinsi Sulawesi Utara
- ydi : PDRB perkapita kabupaten i
- yni : PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Utara

- Timur : Laut Mauluku
- Selatan : Teluk Tomini
- Barat : Provinsi Gorontalo

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Geografis

Provinsi Sulawesi Utara terletak di jazirah utara Pulau Sulawesi dan merupakan satu dari tiga provinsi di Indonesia yang memiliki keunggulan geoposisi, geostrategi, dan geopolitik serta terletak di tepian pasifik. Dua provinsi lainnya adalah Sumatera Utara dan Daerah Istimewa Aceh. Dilihat dari letak geografis Sulawesi Utara terletak pada 0°LU – 3°LU (Lintang Utara) dan 123°BT

–126° BT (Bujur Timur). Kedudukan jazirah membujur dari timur ke barat dengan daerah paling utara adalah Kepulauan Sangihe dan Talaud. Wilayah kepulauan ini berbatasan langsung negara Tetangga Filipina. Wilayah Sulawesi Utara mempunyai batas-batas:

- Utara : Laut Sulawesi, Samudera Pasifik, dan Filipina

Kondisi Penduduk

Berdasarkan angka proyeksi penduduk tahun 2018, tercatat jumlah penduduk Sulawesi Utara sebanyak 2.484.392 ribu jiwa yang terdiri dari 1.267,5 ribu jiwa (51,02 %) penduduk laki-laki dan 1.216,9 ribu jiwa penduduk perempuan (48,98 %), dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk 2010-2018 sebesar 1,09 persen pertahun. Terkait dengan jumlah penduduk yang tinggi tentunya terdapat faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah tingkat atau laju pertumbuhan penduduk, besarnya laju pertumbuhan penduduk membuat penambahan jumlah penduduk semakin meningkat. Semakin besar presentasi kenaikannya maka semakin besar jumlah penduduknya. Semakin tingginya rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun, otomatis akan meningkatkan jumlah penduduk secara pesat.

Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk di Provinsi Sulawesi Utara menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2018

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota (Jiwa)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Bolaang Mongondow	229.604	233.189	236.893	240.505	244.185
2	Minahasa	325.680	329.003	332.190	335.321	228.364
3	Kepulauan Sangihe	129.103	129.584	130.024	130.493	130.833
4	Kepulauan Talaud	87.922	88.803	89.836	90.678	91.599
5	Minahasa Selatan	203.317	204.983	206.603	208.013	209.501
6	Minahasa Utara	196.419	198.084	199.498	200.985	202.317
7	Bolaang Mongondow Utara	75.290	76.331	77.383	78.437	79.366
8	Kepulauan Sitaro	65.284	65.582	65.827	65.976	66.225
9	Minahasa Tenggara	103.818	104.536	105.163	105.714	106.303
10	Bolaang Mongondow Selatan	61.177	62.222	63.207	64.171	65.127
11	Bolaang Mongondow Timur	67.824	68.692	69.716	70.610	71.477
12	Kota Manado	423.257	425.634	427.906	430.133	431.880
13	Bitung	202.204	205.675	208.995	212.409	215.711
14	Kota Tomohon	98.686	100.373	101.981	103.711	105.306
15	Kotamobagu	117.019	119.427	121.699	123.872	126.198
Total Jumlah Penduduk Sulawesi Utara		2.386.604	2.412.118	2.436.921	2.461.028	2.484.392

Sumber: BPS Sulut Tahun 2014 - 2018

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak tahun 2014 yaitu Kota Manado dengan angka 423.257 jiwa dan yang sedikit yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan angka 61.177 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak tahun 2015 masih berada pada Kota Manado dengan angka 425.634 jiwa dan yang sedikit yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan angka 62.222 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak tahun 2016 yaitu Kota Manado dengan angka 427.906 jiwa dan yang sedikit yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan angka 63.207 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak tahun 2017 yaitu

Kota Manado dengan angka 430.133 jiwa dan yang sedikit yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow selatan dengan angka 64.171 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak tahun 2018 juga tetap dipegang oleh Kota Manado dengan angka 431.880 jiwa dan yang sedikit yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan angka 65.127 jiwa.

PDRB Perkapita

Hasil perhitungan PDRB perkapita menurut kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat dalam Tabel 3.

Tabel 3. PDRB Perkapita ADHK Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2018

No	Kabupaten/ Kota	PDRB Perkapita ADHK Menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Bolaang Mongondow	17.035.332,13	17.760.699,26	18.629.504,45	19.573.225,92	20.724.560,06
2	Minahasa	27.039.453,75	28.417.583,42	29.850.112,88	31.365.291,46	32.985.374,03
3	Kepulauan Sangihe	17.669.117,68	18.672.802,96	19.740.697,10	20.741.042,81	21.824.050,50
4	Kepulauan Talaud	14.257.439,54	14.853.569,13	15.458.684,71	16.096.916,56	16.742.526,66
5	Minahasa Selatan	22.502.189,68	23.726.363,16	24.737.368,28	26.173.062,74	27.570.131,40
6	Minahasa Utara	34.577.206,88	36.696.940,18	39.006.374,49	41.237.194,31	43.613.354,78
7	Bolaang Mongondow Utara	16.574.051	17.295.767,11	18.111.339,69	18.990.060,81	19.928.515,98
8	Kepulauan Sitaro	17.508.963,91	18.651.504,98	19.883.725,52	21.226.391,41	22.570.708,94
9	Minahasa Tenggara	25.948.904,81	27.392.766,12	28.948.985,86	30.630.073,59	32.292.999,25
10	Bolaang Mongondow Selatan	16.034.110,85	16.704.601,26	17.452.744,15	18.263.835,68	19.184.121,79
11	Bolaang Mongondow Timur	21.166.595,89	22.252.959,58	23.148.394,91	24.160.913,46	25.079.352,79
12	Kota Manado	43.909.142,19	46.455.855,50	49.529.165,51	52.595.945,90	55.865.327,17
13	Bitung	43.299.364,50	44.073.622,94	45.635.277,87	47.678.549,87	49.769.850,40
14	Kota Tomohon	23.529.910,01	24.529.883,53	25.154.685,67	26.922.598,37	28.138.856,28
15	Kotamobagu	14.889.453,84	15.540.568,71	16.262.303,71	17.061.234,98	17.863.654,73
Total PDRB Perkapita Sulawesi Utara		355.941.236,66	373.025.487,84	391.549.364,80	412.716.337,87	434.153.384,76

Sumber: BPS Sulut (data diolah)

Tabel 3 menunjukkan bahwa Kabupaten/kota dengan pendapatan perkapita tergolong sangat rendah secara berturut-turut yaitu Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow, Kepulauan Sitaro, dan Kepulauan Sangihe. Sementara kabupaten/kota dengan pendapatan perkapita tergolong sangat tinggi secara berturut-turut yaitu Kota Manado, Bitung, Minahasa Utara, Minahasa, Minahasa Tenggara, Kota Tomohon, Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow Timur.

Analisis Tingkat Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara

Hasil perhitungan tingkat ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara pada Tabel 4 berdasarkan perhitungan Indeks Williamson disparitas pendapatan penduduk Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 2014-2018 memperoleh rata-rata 0,49. Artinya, disparitas pendapatan antar daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara rendah dengan rata-rata < 0,5.

Tabel 4. Indeks Williamson di Provinsi Sulawesi Utara

Tahun	Indeks Williamson	Keterangan
2014	0,48	Disparitas Rendah
2015	0,48	Disparitas Rendah
2016	0,49	Disparitas Rendah
2017	0,49	Disparitas Rendah
2018	0,50	Disparitas Tinggi
Rata-rata	0,49	Disparitas Rendah

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Pertumbuhan ekonomi yang berlaku belum tentu menghasilkan pembangunan ekonomi dan peningkatan dalam kesejahteraan (pendapatan) masyarakat, hal ini disebabkan karena bersamaan dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi akan berlaku pula pertambahan penduduk. Apabila tingkat pertumbuhan ekonomi selalu rendah dan tidak melebihi tingkat pertambahan penduduk, pendapatan rata-rata masyarakat (pendapatan perkapita) akan mengalami penurunan. Apabila dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi sama dengan pertumbuhan penduduk, maka perekonomian negara tersebut tidak mengalami perkembangan dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mengalami kemajuan (Sukirno, 2006) dalam Bantika (2015). Adapun PDRB harga konstan dan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. PDRB Harga Konstan dan Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2018

Tahun	PDRB Harga Konstan (Juta Rupiah)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2014	66.360.757	2.386.604
2015	70.425.330,20	2.412.118
2016	74.764.660,50	2.436.921
2017	79.485.473,60	2.461.028
2018	84.258.691,30	2.484.392
Rata-rata	75.058.982,52	2.436.212

Sumber: Data diolah, 2020

Analisis Tipologi Klassen di Provinsi Sulawesi Utara

Rata-rata PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. PDRB Perkapita ADHK dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2018

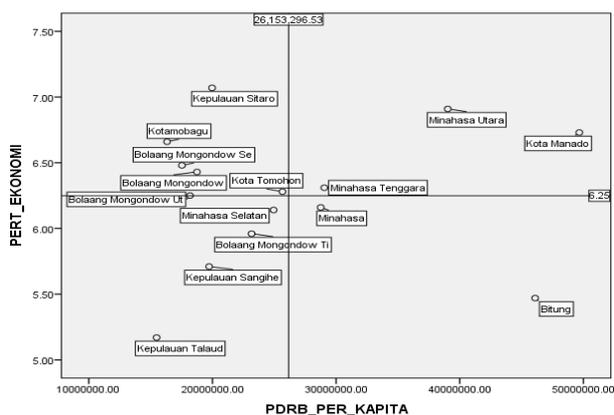
Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
Petani	109	54,22
Buruh	35	17,41
Karyawan BUMN	21	10,44
Pensiunan	17	8,45
Wiraswasta	11	5,48
TNI/Polri	5	2,50
Karyawan perusahaan	3	1,50
Jumlah	201	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

Keterangan :

- X = rata-rata PDRB perkapita
- Y = rata-rata pertumbuhan ekonomi

Tabel 6 menunjukkan bahwa rata-rata PDRB per kapita tertinggi yaitu Kota Manado dengan pertumbuhan yang cenderung tidak stabil. Pertumbuhan tersebut juga tidak diikuti pemerataan di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Mudrajat Kuncoro (2004) dalam (Faiz, 2011) menyatakan bahwa gambaran dan pola struktur masing-masing daerah yang merepresentasikan kesejahteraan penduduknya dapat diketahui dengan menggunakan tipologi daerah yang berdasarkan 2 indikator utama, yakni pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita daerah. PDRB perkapita sebagai sumbu horizontal dan laju pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal. Sehingga, dapat dibedakan kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar 1.



Sumber : Olahan data sekunder

Gambar 1. Pola dan Struktur Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 7. Klasifikasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Menurut Tipologi Klassen

PDRB Per kapita (y)		
Laju Pertumbuhan (r)	y _{di} > y _{ni} (+)	y _{di} < y _{ni} (-)
rd _j > rn _j (+)	(III) Daerah berkembang cepat tapi tidak maju - Kepulauan Sitaro - Kotamobagu - Bolaang Mongondow Selatan - Bolaang Mongondow - Kota Tomohon	(I) Daerah maju dan tumbuh cepat - Kota Manado - Minahasa Utara - Minahasa Tenggara
rd _j < rn _j (-)	(IV) Daerah relatif tertinggal - Bolaang Mongondow Utara - Minahasa Selatan - Bolaang Mongondow Timur - Kepulauan Sangihe - Kepulauan Talaud	(II) Daerah maju tapi tertekan - Minahasa - Bitung

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 7 menunjukkan bahwa pengklasifikasian yang menggunakan Tipologi Klassen diketahui bahwa dari 15 kabupaten/kota, 5 di antaranya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Kabupaten Kepulauan Talaud termasuk dalam kategori daerah relatif tertinggal, sehingga menunjukkan adanya ketimpangan wilayah.

Hubungan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pemerataan Pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara

Salah satu konsep dan definisi yang biasa dipakai dalam membicarakan pendapatan regional adalah PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) yang berasal dari PAD (Pendapatan Hasil Daerah) dibagi dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut. Angka pendapatan perkapita itu sendiri dapat dinyatakan dalam harga berlaku maupun dalam harga konstan, tergantung pada kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Dalam hal ini tentu dibutuhkannya suatu hal yang saling berkaitan dalam peningkatan pendapatan demi menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi di wilayah tersebut, sehingga suatu wilayah akan mengalami pemerataan sempurna.

Tabel 8. PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi

Tahun	PDRB Per Kapita (Rupiah)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
2014	355.941.236,66	6,31
2015	373.025.487,84	6,12
2016	391.549.364,80	6,16
2017	412.716.337,87	6,31
2018	434.153.384,76	6,01
Rata-rata	393.477.162,38	6,18

Sumber: BPS Sulut (data diolah)

Tabel 8 menunjukkan bahwa hasil perhitungan, PDRB per kapita Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan tingkat pendapatan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak tetap dan berubah-ubah selama periode waktu tertentu dan cenderung mengalami ketidakmerataan. Hal ini disebabkan masih terbatasnya jangkauan sarana dan prasarana dalam masyarakat. Kondisi diatas menghadapkan Sulawesi Utara pada tantangan untuk meningkatkan, pemeratakan, dan memperluas jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya, serta jangkauan informasi sampai ke seluruh pelosok daerah. Pembangunan diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan antar golongan pendapatan. Tingkat kesenjangan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara memiliki kecenderungan semakin kecil dengan kesenjangan ekonomi berkategori rendah.

Hubungan Pertumbuhan dan Ketimpangan Kabupaten/Kota

Ketimpangan di Sulawesi Utara bisa dilihat dari Indeks Williamson yang merupakan suatu ukuran ketimpangan ekonomi (pendapatan) antar wilayah, yang angkanya berkisar antara nol sampai satu. Bila mengacu pada nilai Indeks Williamson pada Tabel 4, tingkat disparitas rata-rata Provinsi Sulawesi Utara tahun 2014-2018 masuk dalam kategori disparitas rendah ($< 0,5$). Selama tahun 2014- 2018 nilai Indeks Williamson di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan tren kearah peningkatan. Secara umum, daerah perkotaan mulai tahun 2014-2018 lebih tinggi daripada daerah pedesaan. Sehingga, masih menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan. Ketidak-merataan menyebabkan ketimpangan merupakan masalah yang harus dicarikan penyelesaiannya. Masalah yang timbul apabila ketimpangan semakin besar akan menimbulkan terjadinya konflik dan meningkatkan angka kriminalitas, sehingga apabila hal tersebut dibiarkan terus menerus bisa menyebabkan ketidakstabilan didalam suatu perekonomian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain bahwa ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara antar kabupaten/kota pada periode 2014-2018 mengalami peningkatan. Rata-rata angka Indeks Williamson di Provinsi Sulawesi Utara periode penelitian adalah sebesar 0,49 dengan kriteria ketidakmerataan rendah.

Pengklasifikasian kabupaten/kota berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita di Provinsi Sulawesi Utara memakai alat analisis Tipologi Klassen periode 2014-2018 dengan pendekatan daerah terbagi menjadi empat klasifikasi yang ada. Daerah maju dan tumbuh cepat, yakni Kota Manado, Minahasa Utara dan Minahasa Tenggara; daerah maju tapi tertekan, yakni Minahasa, Bitung; daerah berkembang cepat tetapi tidak maju, yakni Kepulauan Sitaro, Kotamobagu, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow, Kota Tomohon; dan daerah relatif tertinggal yakni Bolaang Mongondow Utara, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai masukan, yaitu:

1. Pemerintah dianjurkan merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat untuk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara dan mengarahkan pengembangan infrastruktur kepada kabupaten/kota yang masih tertinggal dengan mengalokasikan subsidi kepada masyarakat secara langsung (pengeluaran/belanja daerah yang lebih besar) maupun secara tidak langsung melalui penciptaan lapangan kerja, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, dan sebagainya.
2. Pemerintah daerah dalam kebijakan pembangunannya agar memprioritaskan pada daerah yang relatif tertinggal dan daerah berkembang cepat tetapi tidak maju (kuadran IV dan III). Pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur agar lebih merata dan menyebarkan pusat - pusat pertumbuhan dan investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS), 2019. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2017. Sulawesi Utara: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2019. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2017. Sulawesi Utara: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2019. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Utara 2014-2017. Sulawesi Utara: BPS.
- Banendro, S. D. 2016. Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kecamatan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2006-2012. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember. Jember.
- Bantika, V. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sulawesi Utara. *Ejurnal Unsrat*, Vol. 6 No 17, 1-33.
- Budiarto, W. 2014. Analisa Disparitas Pendapatan Dengan Menggunakan Koefisien Gini dan Indeks Williamson. Program Studi Matematika Terapan, Magister Sains, Institut Pertanian Bogor. Bogor.

- Derek, R. R., Laoh, O. E., Jocom, S. 2019. Analisis Ketimpangan Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara. Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi. Jurnal Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah, AGRIRUD – Vol. 1, No 2, 254 – 264.
- Dewi, I. A. I. U., Budhi, M. K. S., Sudirman, W. 2014. Analisis Ketimpangan Pembangunan Antara Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana. Bali.
- Dondo, T. C. 2019. Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. Fakultas Pertanian, Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2019. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, 2018 di Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara.
- Raswita, N. P. M. E. dan Utama, M. S. 2013. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan di Kabupaten Gianyar. E-Jurnal EP Unud, Vol. 2 No 3, 119-128.